

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera, yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung. Pemilihan wilayah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Sumatera memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perikanan, baik melalui kegiatan penangkapan maupun budidaya, yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Secara geografis, Pulau Sumatera terletak di bagian barat Indonesia dengan posisi yang strategis. Di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, di bagian timur berhadapan dengan Selat Malaka, sedangkan di utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kondisi geografis ini menjadikan kawasan Sumatera memiliki keunggulan komparatif dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, karena sebagian besar provinsinya memiliki garis pantai yang panjang, ekosistem pesisir yang produktif, serta perairan laut yang kaya akan potensi ikan.

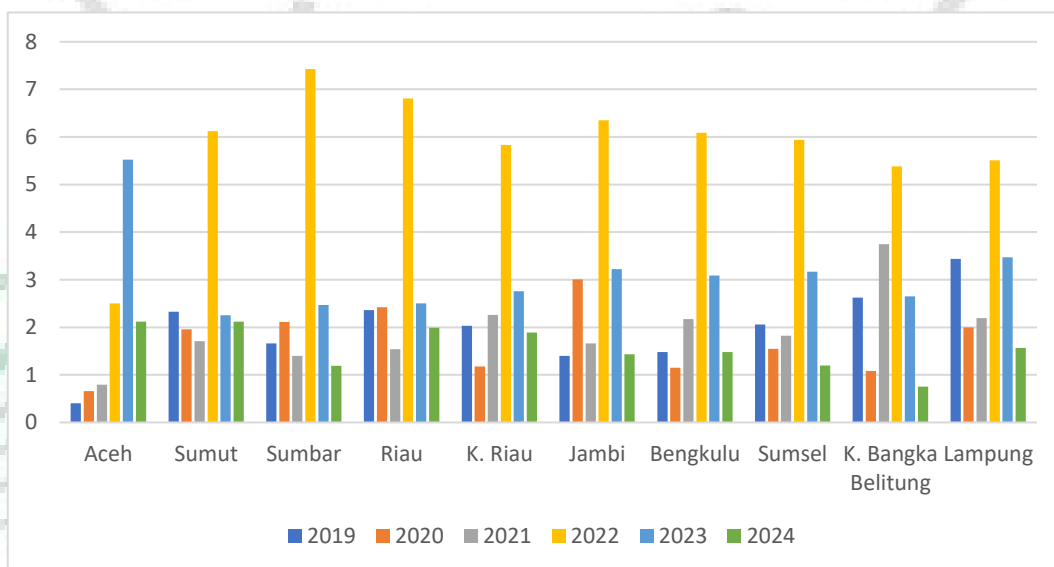
Dari sisi administratif, setiap provinsi memiliki karakteristik wilayah yang berbeda. Provinsi-provinsi yang berada di kawasan timur, seperti Riau dan Kepulauan Riau, dikenal sebagai jalur perdagangan internasional yang strategis karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Sementara itu, provinsi seperti Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung memiliki potensi besar pada subsektor

perikanan budidaya, khususnya perikanan air tawar. Keanekaragaman kondisi geografis dan ekonomi ini menjadikan Pulau Sumatera sebagai salah satu kawasan penting dalam pengembangan industri perikanan di Indonesia.

## 4.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian

### 4.2.1 Perkembangan Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang mencerminkan perubahan tingkat harga secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Perubahan inflasi berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat, biaya produksi, serta stabilitas harga kebutuhan pokok, termasuk produk perikanan. Pada tingkat regional, dinamika inflasi di provinsi-provinsi Sumatera menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh faktor struktural daerah, kebijakan fiskal dan moneter, serta pola konsumsi masyarakat.



Sumber: Badan pusat Statistik Indonesia

**Gambar 4.1** Tren Inflasi Tiap Provinsi Di Pulau Sumtera

Berdasarkan gambar tren perkembangan inflasi di sepuluh provinsi di Sumatera periode 2019–2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, beberapa provinsi seperti Aceh mencatat inflasi relatif tinggi, sementara provinsi lain cenderung stabil pada kisaran 2–3 persen. Memasuki tahun 2020, hampir seluruh provinsi mengalami penurunan inflasi, yang mencerminkan lemahnya permintaan akibat dampak pandemi COVID-19.

Tahun 2021 ditandai dengan inflasi yang masih terkendali pada sebagian besar daerah, namun mulai terlihat adanya perbedaan pola antarprovinsi. Lonjakan yang paling mencolok terjadi pada tahun 2022, di mana hampir semua provinsi mencatat inflasi di atas 5 persen. Sumatera Barat, Riau, Jambi, serta Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi, masing-masing mendekati atau melebihi 6–7 persen. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya harga pangan dan energi akibat gangguan rantai pasok serta pemulihan ekonomi pasca pandemi.

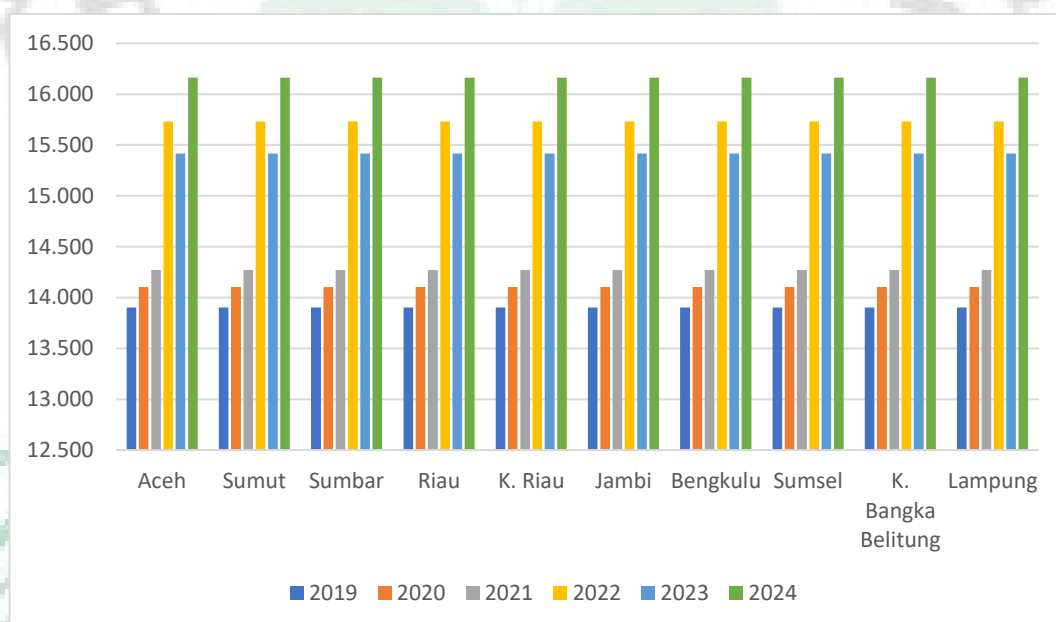
Pada tahun 2023, laju inflasi mulai menurun di hampir semua provinsi, meskipun masih terdapat variasi antarwilayah. Aceh dan beberapa provinsi lain menunjukkan angka inflasi yang kembali moderat. Tren ini berlanjut hingga 2024, dengan tingkat inflasi yang relatif stabil di kisaran 2–3 persen pada sebagian besar daerah, meskipun beberapa provinsi seperti Sumatera Barat dan Jambi masih mencatat angka sedikit lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Dengan demikian, grafik tersebut memperlihatkan bahwa inflasi di Sumatera memiliki karakteristik siklikal, dengan puncak tertinggi terjadi pada 2022, kemudian berangsur turun pada 2023 dan 2024. Perbedaan antarprovinsi

menunjukkan adanya pengaruh faktor struktural daerah, seperti ketergantungan pada komoditas tertentu, perbedaan distribusi barang, serta efektivitas kebijakan pengendalian harga di masing-masing wilayah.

#### 4.2.2 Perkembangan Nilai Tukar

Nilai tukar (exchange rate) merupakan indikator penting dalam perekonomian karena mencerminkan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Fluktuasi nilai tukar dapat memengaruhi stabilitas ekonomi, terutama pada sektor perdagangan internasional. Bagi sektor perikanan, perubahan nilai tukar berpengaruh terhadap harga ekspor-impor, biaya produksi, serta daya saing produk di pasar global.



Sumber: Badan pusat Statistik Indonesia

#### Gambar 4.2 Tren Nilai Tukar Tiap Provinsi Di Pulau Sumtera

Berdasarkan gambar diatas, terlihat adanya tren kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, nilai tukar masih berada pada kisaran

Rp14.000 per dolar AS. Namun, pada tahun 2020, terjadi pelemahan rupiah yang cukup signifikan dengan rata-rata menembus kisaran Rp14.300 sampai Rp14.400 per dolar AS. Kondisi ini dipicu oleh ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi COVID-19.

Memasuki 2021, nilai tukar relatif stabil meskipun masih lebih lemah dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2022, pelemahan rupiah kembali terjadi, mencapai kisaran Rp15.000 per dolar AS. Hal ini sejalan dengan meningkatnya tekanan eksternal, seperti kenaikan suku bunga acuan The Fed dan ketidakpastian harga komoditas global.

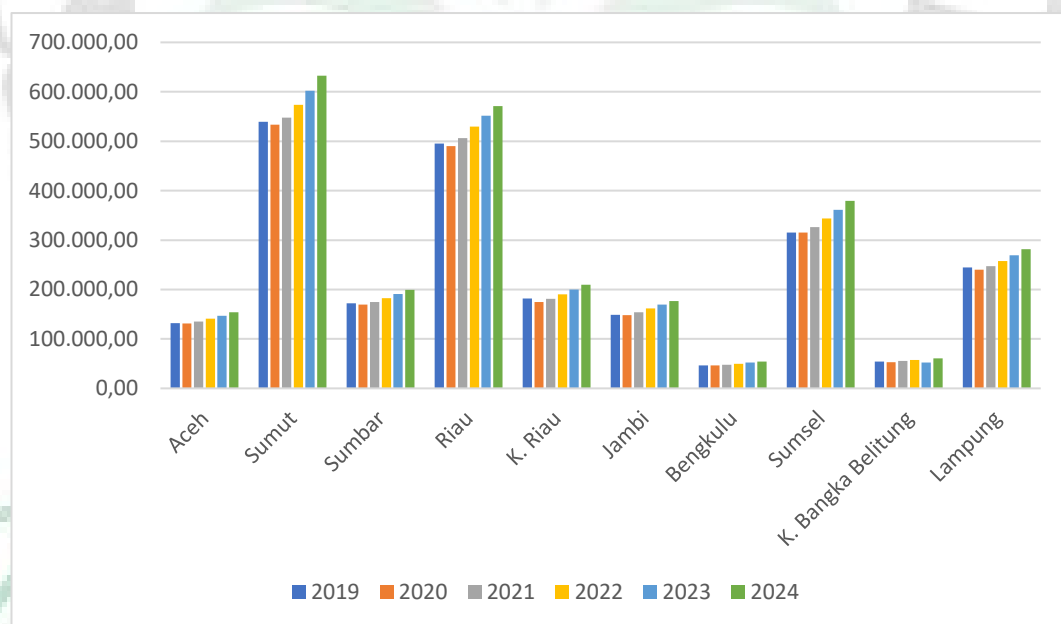
Tahun 2023 menunjukkan penguatan relatif, di mana nilai tukar rupiah sempat bergerak di kisaran Rp15.500. Namun, pada 2024, pelemahan kembali terjadi dengan rata-rata menembus Rp16.000 per dolar AS. Tren ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat periode stabilisasi, secara keseluruhan rupiah cenderung mengalami depresiasi dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Secara regional, pola pergerakan nilai tukar di seluruh provinsi di Sumatera cenderung sama, mengingat nilai tukar merupakan indikator nasional yang berlaku secara umum. Namun, implikasinya terhadap sektor perikanan bisa berbeda antarprovinsi, bergantung pada tingkat keterlibatan daerah dalam perdagangan internasional. Provinsi dengan orientasi ekspor perikanan yang tinggi, seperti Riau dan Kepulauan Riau, lebih rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dibandingkan provinsi yang orientasi produksinya dominan untuk konsumsi domestik. Dengan demikian, gambar tersebut menunjukkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah

menjadi tantangan serius bagi stabilitas ekonomi, khususnya sektor perikanan, karena berdampak langsung pada biaya input produksi, harga jual, dan daya saing produk di pasar global.

#### 4.2.3 Perkembangan Pendapatan (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran nilai tambah yang dihasilkan seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Indikator ini menggambarkan kinerja perekonomian daerah secara menyeluruh, termasuk daya beli masyarakat yang dapat memengaruhi pola konsumsi, salah satunya terhadap produk perikanan.



Sumber: Badan pusat Statistik Indonesia

**Gambar 4.3 Tren Pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tiap Provinsi Di Pulau Sumatra**

Berdasarkan gambar di atas, perkembangan Pendapatan (PDRB) pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan tren yang relatif meningkat dari tahun 2019 hingga 2024. Meskipun sempat terjadi perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, sejak tahun 2021 perekonomian kembali mengalami pemulihan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut terus berlanjut hingga 2024, mencerminkan penguatan aktivitas ekonomi regional. Secara komparatif, provinsi dengan struktur ekonomi yang kuat seperti Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan memiliki capaian Pendapatan (PDRB) tertinggi, menunjukkan peran penting sektor industri, perdagangan, dan pertanian dalam mendorong perekonomian daerah. Sementara itu, provinsi dengan basis ekonomi yang lebih kecil seperti Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan Pendapatan (PDRB) yang lebih rendah, meskipun tetap mengalami tren pertumbuhan positif.

Kenaikan Pendapatan (PDRB) ini sejalan dengan teori konsumsi Keynes, yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan agregat akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan Pendapatan (PDRB) (X3) berpotensi memperkuat permintaan terhadap produk perikanan, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan industri pengolahan.

#### **4.3 Analisis Hasil Penelitian**

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, yaitu dengan mengombinasikan data *cross section* (data antar wilayah/objek) dan data *time series* (data berdasarkan urutan waktu). Dalam regresi data panel terdapat tiga pendekatan utama, yakni *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Untuk mengetahui model mana yang paling tepat

digunakan, dilakukan serangkaian pengujian pemilihan model terbaik. Uji spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *Chow Test*, *Hausman Test*, serta *Lagrange Multiplier (LM) Test*.

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk membandingkan *Common Effect Model (CEM)* dengan *Fixed Effect Model (FEM)*. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.1 Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	402.791154	(10,46)	0.0000
Cross-section Chi-square	269.023049	10	0.0000

*Sumber: Data Diolah 2025*

Hasil Uji Chow pada tabel menunjukkan bahwa nilai probabilitas baik pada *Cross-section F* maupun *Cross-section Chi-square* adalah  $0.0000 < 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model yang lebih sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM).

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk membandingkan Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Hasil pengujian Hausman pada penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.153844	3	0.0273

*Sumber: Data Diolah 2025*

Berdasarkan hasil Uji Hausman, nilai probabilitas sebesar  $0.0273 < 0,05$  menunjukkan bahwa model yang sesuai adalah *Fixxed Effect Model (FEM)*. Dengan demikian, FEM dipilih karena lebih efisien dibandingkan dengan *Random Effect Model (REM)* dalam penelitian ini. Karena dari dua uji pemilihan model memilih FEM maka uji lagrange multiplier tidak perlu dilakukan

#### 4.4 Uji Asumsi Klasik

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixxed Effect Model* dimana uji asumsi klasik harus dilakukan untuk melihat kecocokan model dalam penelitian ini.

##### a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang kuat antar variabel independen dalam penelitian. Apabila antar variabel bebas saling berkorelasi, maka hal tersebut dapat menimbulkan bias sehingga model regresi menjadi kurang tepat untuk digunakan. Adapun hasil pengujian multikolinearitas serta heteroskedastisitas disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas**

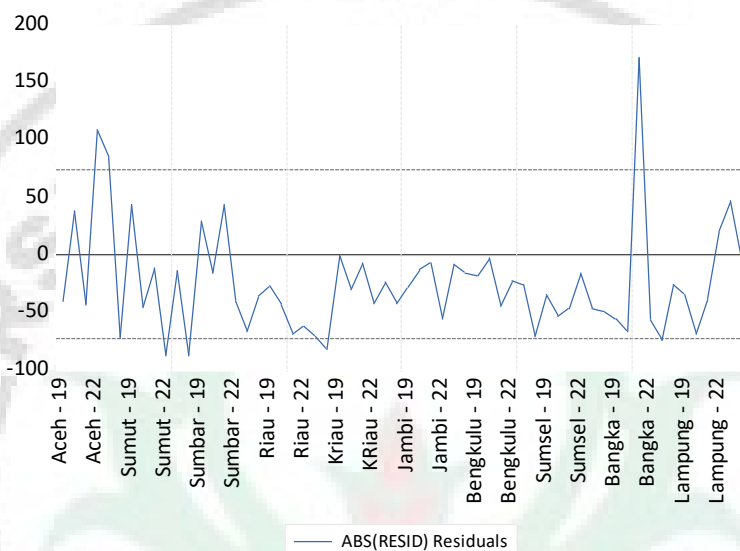
	INFLASI	NILAI_TUKAR	PDRB
INFLASI	1.000000	0.397881	-0.029797
NILAI_...	0.397881	1.000000	0.080544
PDRB	-0.029797	0.080544	1.000000

*Sumber: Data Diolah 2025*

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas, terlihat bahwa nilai korelasi antar variabel independen (inflasi, nilai tukar, dan PDRB) berada di bawah 0,85. Nilai korelasi tertinggi hanya sebesar 0,397881 antara inflasi dan nilai tukar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model penelitian ini sehingga variabel independen layak digunakan untuk analisis regresi lebih lanjut.

#### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan varians residual antar pengamatan dalam model regresi. Jika varians residual bersifat sama atau konstan, maka disebut homoskedastisitas, sedangkan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Suatu model regresi dianggap baik apabila tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas.

**Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

*Sumber: Data Diolah 2025*

Berdasarkan grafik residual, terlihat bahwa nilai residual berada dalam rentang  $-500$  hingga  $500$  dan tidak melampaui batas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran residual relatif stabil dan tidak menunjukkan variasi yang ekstrem. Dengan demikian, varians residual dapat dikatakan relatif seragam, sehingga tidak terdapat indikasi yang kuat adanya gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

#### 4.5 Model Analisis Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Pemilihan model ini didasarkan pada hasil serangkaian uji spesifikasi, yaitu Chow Test, Hausman Test, dan Lagrange Multiplier Test, yang menunjukkan bahwa model FEM lebih sesuai dibandingkan Common Effect Model (CEM) maupun Random Effect Model (REM). Model FEM digunakan karena

dianggap mampu menangkap perbedaan karakteristik khusus antarprovinsi (cross-section) dalam data panel, sehingga dapat memberikan estimasi yang lebih akurat terhadap hubungan antara inflasi, nilai tukar, dan pendapatan PDRB terhadap PDRB sektor perikanan.

**Tabel 4.5 Hasil Estimasi *Fixed Effect Model***

Dependent Variable: PDRBP				
Method: Panel Least Squares				
Date: 01/09/26 Time: 11:29				
Sample: 2019 2024				
Periods included: 6				
Cross-sections included: 10				
Total panel (balanced) observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3158.713	734.5376	4.300275	0.0001
INFLASI	-59.01166	26.49784	-2.227037	0.0308
NILAI TUKAR	0.298748	0.079860	3.740894	0.0005
PDRB	-0.000866	0.003486	-0.248567	0.8048
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.994733	Mean dependent var	7252.006	
Adjusted R-squared	0.993389	S.D. dependent var	3854.063	
S.E. of regression	313.3768	Akaike info criterion	14.52183	
Sum squared resid	4615635.	Schwarz criterion	14.97560	
Log likelihood	-422.6548	Hannan-Quinn criter.	14.69932	
F-statistic	739.7442	Durbin-Watson stat	1.210193	
Prob(F-statistic)	0.000000			

*Sumber: Hasil olah data dengan eviews 12.0*

Berdasarkan hasil estimasi dengan Fixed Effect Model (FEM), diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{PDRBP}_{it} = 3158,713 - 59,01166(\text{INF}_{it}) + 0,2988(\text{NT}_{it}) - 0,000866(\text{PDRB}_{it}) + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

PDRBP = Produk Domestik Regional Bruto sektor perikanan

INF = Inflasi

NT = Nilai Tukar

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

$\epsilon_{it}$  = error term

$\beta_0$  = konstanta

$\beta_1$ – $\beta_3$  = koefisien regresi masing-masing variabel independen

Berikut adalah hasil output dari estimasi Fixed Effect Model:

a. **Variabel Secara Menyeluruh**

Nilai R-squared sebesar 0,994863 menunjukkan bahwa 99,49% variasi pada PDRB sektor perikanan dapat dijelaskan oleh inflasi, nilai tukar, dan Pendapatan (PDRB) sedangkan sisanya 0,51% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik.

b. **Variabel Inflasi**

Koefisien inflasi sebesar  $-60,01238$  dengan nilai  $t_{\text{hitung}} = -2,267331 < -1,673$  ( $t_{\text{tabel}}$ ) dan  $\text{Prob} = 0,0281 < 0,05$  menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB sektor perikanan.

Artinya, setiap kenaikan inflasi sebesar 1 persen akan menurunkan PDRB sektor perikanan sebesar 60,01 satuan, dengan pengaruh yang signifikan secara statistik. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi makro yang

menyatakan bahwa kenaikan harga umum dapat menekan daya beli dan menurunkan aktivitas produksi sektor riil, termasuk sektor perikanan.

**c. Variabel Nilai Tukar**

Koefisien nilai tukar sebesar 0,314491 dengan nilai  $t_{\text{hitung}} = 3,880323 > 1,673$  ( $t_{\text{tabel}}$ ) dan  $\text{Prob} = 0,0003 < 0,05$  menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor perikanan. Hal ini berarti, setiap pelemahan nilai tukar (kenaikan kurs dolar terhadap rupiah) sebesar Rp1 akan meningkatkan PDRB sektor perikanan sebesar 0,314 satuan. Hasil ini menunjukkan bahwa depresiasi rupiah mampu meningkatkan daya saing ekspor produk perikanan Indonesia, sehingga mendorong pertumbuhan output sektor perikanan di daerah.

**d. Variabel Pendapatan (PDRB)**

Koefisien Pendapatan (PDRB) sebesar  $-0,001272$  dengan  $t_{\text{hitung}} = -0,363415 < 1,673$  ( $t_{\text{tabel}}$ ) dan  $\text{Prob} = 0,7180 > 0,05$  menunjukkan bahwa variabel Pendapatan (PDRB) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PDRB sektor perikanan. Artinya, peningkatan Pendapatan (PDRB) di suatu provinsi tidak secara langsung diikuti oleh peningkatan PDRB sektor perikanan. Hal ini dapat disebabkan karena kontribusi sektor perikanan terhadap total perekonomian masih relatif kecil dibandingkan sektor-sektor lain, seperti industri pengolahan dan pertanian nonperikanan.

Berdasarkan hasil diatas diperoleh nilai koefisien 10 provinsi di Pulau Sumatera adalah sebagai berikut

No	Provinsi	Nilai Efek Tetap (C)	Individual Effect (%)
1	Aceh	-541,7586	-7,47%
2	Sumatera Utara	3.237,423	44,64%
3	Sumatera Barat	-845,1775	-11,65%
4	Riau	5.410,307	74,60%
5	Kepulauan Riau	-3.870,089	-53,37%
6	Jambi	-4.252,907	-58,64%
7	Bengkulu	-4.178,233	-57,61%
8	Sumatera Selatan	2.225,087	30,68%
9	Kep. Bangka Belitung	-3.749,537	-51,70%
10	Lampung	6.564,885	90,53%

Sumber: Output Eviews, data diolah 2026

Dari persamaan regresi diatas dapat diartikan persamaan setiap provinsinya:

$$1. \text{ Aceh} = -541,7586 - 59,01166 \text{ INFLASI} + 0,298748 \text{ NILAI TUKAR} - 0,000866 \text{ PDRB}$$

Jika inflasi, nilai tukar, dan PDRB tetap, maka permintaan sektor perikanan di Provinsi Aceh lebih rendah sekitar 7,47 persen dibandingkan rata-rata provinsi di Pulau Sumatera.

$$2. \text{ Sumatera Utara} = 3.237,423 - 59,01166 \text{ INFLASI} + 0,298748 \text{ NILAI TUKAR} - 0,000866 \text{ PDRB}$$

Jika inflasi, nilai tukar, dan PDRB tetap, maka permintaan sektor perikanan di Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi sekitar 44,64 persen dibandingkan rata-rata provinsi di Pulau Sumatera.

3. Sumatra Barat =  $-845,1775 - 59,01166 \text{ INFLASI} + 0,298748 \text{ NILAI TUKAR} - 0,000866 \text{ PDRB}$

Jika inflasi, nilai tukar, dan PDRB tetap, maka permintaan sektor perikanan di Provinsi Sumatera Barat lebih rendah sekitar 11,65 persen dibandingkan rata-rata provinsi di Pulau Sumatera.

4. Riau =  $5.410,307 - 59,01166 \text{ INFLASI} + 0,298748 \text{ NILAI TUKAR} - 0,000866 \text{ PDRB}$

Jika inflasi, nilai tukar, dan PDRB tetap, maka permintaan sektor perikanan di Provinsi Riau lebih tinggi sekitar 74,60 persen dibandingkan rata-rata provinsi di Pulau Sumatera.

5. Kepulauan Riau =  $-3.870,089 - 59,01166 \text{ INFLASI} + 0,298748 \text{ NILAI TUKAR} - 0,000866 \text{ PDRB}$

Jika inflasi, nilai tukar, dan PDRB tetap, maka permintaan sektor perikanan di Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah sekitar 53,37 persen dibandingkan rata-rata provinsi di Pulau Sumatera.

6. Jambi =  $-4.252,907 - 59,01166 \text{ INFLASI} + 0,298748 \text{ NILAI TUKAR} - 0,000866 \text{ PDRB}$

Jika inflasi, nilai tukar, dan PDRB tetap, maka permintaan sektor perikanan di Provinsi Jambi lebih rendah sekitar 58,64 persen dibandingkan rata-rata provinsi di Pulau Sumatera.

7. Bengkulu =  $-4.178,233 - 59,01166 \text{ INFLASI} + 0,298748 \text{ NILAI TUKAR} - 0,000866 \text{ PDRB}$

Jika inflasi, nilai tukar, dan PDRB tetap, maka permintaan sektor perikanan di Provinsi Bengkulu lebih rendah sekitar 57,61 persen dibandingkan rata-rata provinsi di Pulau Sumatera.

8. Sumatera Selatan =  $2.225,087 - 59,01166 \text{ INFLASI} + 0,298748 \text{ NILAI TUKAR} - 0,000866 \text{ PDRB}$

Jika inflasi, nilai tukar, dan PDRB tetap, maka permintaan sektor perikanan di Provinsi Sumatera Selatan lebih tinggi sekitar 30,68 persen dibandingkan rata-rata provinsi di Pulau Sumatera.

9. Kepulauan Bangka Belitung =  $-3.749,537 - 59,01166 \text{ INFLASI} + 0,298748 \text{ NILAI TUKAR} - 0,000866 \text{ PDRB}$

Jika inflasi, nilai tukar, dan PDRB tetap, maka permintaan sektor perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah sekitar 51,70 persen dibandingkan rata-rata provinsi di Pulau Sumatera.

10. Lampung =  $6.564,885 - 59,01166 \text{ INFLASI} + 0,298748 \text{ NILAI TUKAR} - 0,000866 \text{ PDRB}$

Jika inflasi, nilai tukar, dan PDRB tetap, maka permintaan sektor perikanan di Provinsi Lampung lebih tinggi sekitar 90,53 persen dibandingkan rata-rata provinsi di Pulau Sumatera.

Provinsi Lampung tercatat memiliki nilai efek tetap paling besar, yaitu sebesar 6.564,885. Nilai ini menunjukkan bahwa ketika inflasi, nilai tukar, dan PDRB diasumsikan tidak mengalami perubahan, tingkat permintaan sektor

perikanan di Provinsi Lampung berada pada posisi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi lain di Pulau Sumatera. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor-faktor khas daerah Lampung memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap permintaan sektor perikanan.

Selain itu, Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara juga menunjukkan nilai efek tetap positif yang relatif tinggi, masing-masing sebesar 5.410,307 dan 3.237,423. Hal tersebut menunjukkan bahwa, dengan asumsi variabel independen tetap, permintaan sektor perikanan di kedua provinsi tersebut cenderung berada di atas rata-rata provinsi lain selama periode penelitian.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai efek tetap positif sebesar 2.225,087. Meskipun nilainya tidak sebesar provinsi dengan efek tetap tertinggi, hasil ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan tetap memberikan kontribusi positif terhadap permintaan sektor perikanan ketika variabel makroekonomi lainnya diasumsikan konstan.

Sebaliknya, beberapa provinsi menunjukkan nilai efek tetap negatif, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Jambi memiliki nilai efek tetap negatif terbesar sebesar -4.252,907, diikuti oleh Provinsi Bengkulu sebesar -4.178,233. Nilai negatif tersebut menunjukkan bahwa, dengan asumsi inflasi, nilai tukar, dan PDRB tetap, permintaan sektor perikanan di provinsi-provinsi tersebut relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi di Pulau Sumatera.

Sementara itu, Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat juga menunjukkan nilai efek tetap negatif, meskipun dengan besaran yang relatif lebih kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa karakteristik khusus daerah di kedua provinsi tersebut belum memberikan dorongan yang signifikan terhadap permintaan sektor perikanan selama periode penelitian. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki nilai efek tetap negatif, yang menunjukkan bahwa permintaan sektor perikanan di provinsi tersebut berada di bawah rata-rata provinsi lainnya.

Secara keseluruhan, hasil estimasi FEM menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik antarprovinsi tetap berperan dalam menentukan variasi permintaan sektor perikanan, meskipun pengaruh variabel inflasi, nilai tukar, dan PDRB telah dikendalikan. Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa faktor spesifik wilayah perlu diperhatikan dalam kajian permintaan sektor perikanan antarprovinsi di Pulau Sumatera.

#### 4.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dalam penelitian berpengaruh signifikan atau tidak. Pengujian yang digunakan meliputi uji parsial (t-statistik), uji simultan (F-statistik), serta koefisien determinasi ( $R^2$ ).

##### a. Uji Parsial (T-statistik)

Uji parsial merupakan metode yang digunakan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain tetap konstan. Pengujian ini dilakukan

menggunakan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Adapun hasil pengujian parsial adalah sebagai berikut:

- 1) Inflasi memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-2,267331 > t_{tabel}$  sebesar 1,673 dengan nilai probabilitas sebesar  $0,0281 < 0,05$ . Dengan demikian,  $H_0$  ditolak, yang artinya inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB sektor perikanan di beberapa provinsi di Pulau Sumatera.
- 2) Nilai Tukar memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3,880323 > t_{tabel}$  sebesar 1,673 dengan nilai probabilitas sebesar  $0,0003 < 0,05$ . Dengan demikian,  $H_0$  ditolak, yang artinya nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor perikanan di beberapa provinsi di Pulau Sumatera.
- 3) Pendapatan (PDRB) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,363415 < t_{tabel}$  sebesar 1,673 dengan nilai probabilitas sebesar  $0,7180 > 0,05$ . Dengan demikian,  $H_0$  diterima, yang artinya pendapatan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor perikanan di beberapa provinsi di Pulau Sumatera.

b. Uji Simultan (F-statistik)

Uji simultan ialah uji yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Uji ini menentukan apakah model persamaan regresi layak digunakan atau tidak. Pada uji F, apabila nilai Prob (F-statistic) lebih besar dari 0,05 maka model dinyatakan tidak layak, sedangkan jika lebih kecil dari 0,05 maka model yang dipakai dianggap layak.

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model, diperoleh nilai F-statistic sebesar 685,2975 dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian,  $H_0$  ditolak, yang berarti bahwa variabel inflasi, nilai tukar, dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor perikanan di beberapa provinsi di Pulau Sumatera. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan mampu menjelaskan variasi PDRB sektor perikanan secara bersama-sama.

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat pada model penelitian. Nilai  $R^2$  berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, maka semakin besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel independen. Sebaliknya, semakin mendekati 0, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin rendah.

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model, diperoleh nilai R-squared sebesar 0,994863 atau sebesar 99,49%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari inflasi, nilai tukar, dan PDRB mampu menjelaskan variasi PDRB sektor perikanan sebesar 99,49%. Sementara itu, sisanya sebesar 0,51% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Nilai R-squared yang tinggi tersebut mengindikasikan bahwa model regresi memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan variasi PDRB sektor perikanan di beberapa provinsi di Pulau Sumatera.

#### **4.7 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.7.1 Pengaruh Inflasi terhadap Permintaan Sektor Perikanan**

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM), diperoleh koefisien inflasi sebesar  $-59,01166$  dengan nilai probabilitas  $0,0308$ . Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 5 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan sektor perikanan. Dengan demikian, setiap kenaikan inflasi sebesar 1 persen akan menurunkan permintaan sektor perikanan yang diprosikan melalui PDRB sektor perikanan sebesar  $59,01$  satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.

Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan tingkat harga secara umum berdampak nyata terhadap penurunan aktivitas ekonomi sektor perikanan. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan teori konsumsi Keynes, yang menyatakan bahwa inflasi akan menurunkan daya beli riil masyarakat sehingga mengurangi kemampuan konsumsi terhadap barang dan jasa, termasuk produk perikanan (Keynes, 1936). Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, rumah tangga cenderung melakukan penyesuaian konsumsi dengan mengurangi kuantitas atau kualitas konsumsi pangan.

Selain dari sisi konsumen, inflasi juga berdampak pada sisi produsen sektor perikanan. Kenaikan harga input produksi seperti bahan bakar, es, pakan, dan biaya distribusi akan meningkatkan biaya operasional nelayan dan pelaku usaha perikanan. Kondisi ini berpotensi menurunkan volume produksi dan aktivitas usaha, yang pada akhirnya tercermin dalam penurunan nilai tambah sektor perikanan (Todaro & Smith, 2020).

Meskipun produk perikanan sering dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok dengan elastisitas permintaan relatif rendah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi yang cukup tinggi tetap mampu menurunkan permintaan secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam kondisi tertentu, terutama ketika inflasi berlangsung secara persisten, masyarakat akan mengurangi konsumsi ikan atau beralih ke sumber protein alternatif yang relatif lebih murah (Varian, 2010).

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sari (2021) yang menemukan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap konsumsi pangan rumah tangga, serta mendukung hasil penelitian Rahmawati (2018) yang menunjukkan bahwa inflasi dapat menekan kinerja sektor perikanan melalui penurunan daya beli dan aktivitas produksi. Namun, hasil ini berbeda dengan Situmorang & Nurhayati (2019) yang menemukan bahwa inflasi tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap konsumsi ikan, perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh perbedaan wilayah, periode penelitian, serta karakteristik ekonomi daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inflasi memiliki peran penting dalam menekan permintaan sektor perikanan, baik melalui penurunan daya beli masyarakat maupun peningkatan biaya produksi. Oleh karena itu, stabilitas harga menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan dan kinerja sektor perikanan di beberapa provinsi di Pulau Sumatera.

#### **4.6.2 Pengaruh Nilai Tukar terhadap Permintaan Sektor Perikanan**

Secara teoritis, nilai tukar diduga memiliki pengaruh terhadap permintaan sektor perikanan melalui dua mekanisme utama, yaitu mekanisme biaya produksi dan mekanisme permintaan ekspor. Dari sisi biaya produksi, pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi meningkatkan harga input impor seperti bahan bakar, pakan, serta peralatan perikanan, sehingga dapat menekan output dan aktivitas sektor perikanan. Berdasarkan mekanisme ini, nilai tukar secara teoritis dapat berdampak negatif terhadap permintaan sektor perikanan.

Namun, berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, diperoleh koefisien nilai tukar sebesar 0,298748 dengan nilai probabilitas 0,0005, yang menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan sektor perikanan. Dengan demikian, dugaan awal yang menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif terhadap permintaan sektor perikanan tidak terbukti secara empiris dalam penelitian ini.

Perbedaan antara dugaan teoritis dan hasil empiris tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme peningkatan permintaan ekspor lebih dominan dibandingkan mekanisme kenaikan biaya produksi. Pelemahan nilai tukar rupiah

meningkatkan daya saing harga produk perikanan Indonesia di pasar internasional, sehingga mendorong peningkatan permintaan ekspor. Peningkatan permintaan tersebut selanjutnya tercermin dalam meningkatnya aktivitas produksi dan nilai tambah sektor perikanan yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perikanan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori perdagangan internasional yang menyatakan bahwa depresiasi nilai tukar dapat meningkatkan permintaan ekspor melalui peningkatan daya saing harga (Krugman & Obstfeld, 2009). Selain itu, karakteristik sektor perikanan Indonesia yang memiliki orientasi ekspor cukup kuat menyebabkan dampak positif nilai tukar terhadap permintaan sektor perikanan menjadi lebih dominan dibandingkan dampak negatif yang timbul dari kenaikan biaya input.

Dengan demikian, meskipun secara teoritis nilai tukar dapat berdampak negatif terhadap permintaan sektor perikanan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks beberapa provinsi di Pulau Sumatera pada periode pengamatan, pengaruh positif nilai tukar lebih dominan, sehingga nilai tukar terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan sektor perikanan.

#### **4.6.3 Pengaruh Pendapatan (PDRB) terhadap Permintaan Sektor Perikanan**

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, diperoleh koefisien variabel Pendapatan (PDRB) sebesar  $-0,000866$  dengan nilai probabilitas  $0,8048 (> 0,05)$ . Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diprosikan melalui Pendapatan (PDRB) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap permintaan sektor

perikanan. Dengan demikian, peningkatan pendapatan regional belum mampu secara nyata mendorong peningkatan permintaan sektor perikanan di beberapa provinsi di Pulau Sumatera.

Secara teoritis, peningkatan PDRB mencerminkan kenaikan pendapatan masyarakat yang seharusnya mendorong peningkatan konsumsi, termasuk konsumsi produk perikanan. Teori konsumsi Keynes menjelaskan bahwa kenaikan pendapatan akan diikuti oleh peningkatan pengeluaran konsumsi, meskipun tidak meningkat secara proporsional (Samuelson & Nordhaus, 2010). Namun demikian, dalam praktiknya, konsumsi ikan menunjukkan elastisitas pendapatan yang relatif rendah, sehingga peningkatan pendapatan tidak selalu diikuti oleh peningkatan permintaan ikan secara signifikan.

Hasil penelitian empiris mendukung temuan tersebut. Suryana et al. (2020) menunjukkan bahwa meskipun ikan merupakan sumber protein utama masyarakat Indonesia, pada kelompok rumah tangga berpendapatan menengah dan tinggi terjadi kecenderungan diversifikasi konsumsi ke sumber protein lain seperti daging unggas dan daging sapi. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan mendorong perubahan preferensi konsumsi, bukan semata-mata peningkatan konsumsi ikan.

Penelitian Hidayati (2017) juga menemukan bahwa kenaikan PDRB berpengaruh positif terhadap konsumsi ikan di Jawa Timur, namun dengan tingkat elastisitas yang rendah. Temuan tersebut diperkuat oleh Nurhayati (2020) yang menyatakan bahwa faktor preferensi budaya, harga relatif antar komoditas pangan,

serta ketersediaan produk menjadi penentu utama konsumsi ikan, sehingga peran pendapatan menjadi kurang dominan.

Dalam konteks Pulau Sumatera, ketidaksignifikanan pengaruh Pendapatan (PDRB) terhadap permintaan sektor perikanan juga dapat dijelaskan oleh adanya disparitas antarwilayah. Provinsi pesisir umumnya memiliki tingkat konsumsi ikan yang lebih tinggi karena kemudahan akses dan harga yang relatif terjangkau. Sebaliknya, wilayah non-pesisir menghadapi kendala distribusi, tingginya biaya transportasi, serta keterbatasan fasilitas penyimpanan, sehingga peningkatan pendapatan tidak secara otomatis meningkatkan konsumsi ikan. Penelitian Hidayat et al. (2023) menunjukkan bahwa konsumsi ikan di wilayah pedalaman lebih dipengaruhi oleh faktor harga dan distribusi dibandingkan tingkat pendapatan rumah tangga.

Dengan demikian, meskipun secara teoritis peningkatan pendapatan yang tercermin dalam Pendapatan (PDRB) berpotensi meningkatkan permintaan sektor perikanan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa permintaan sektor perikanan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti harga relatif, preferensi konsumsi, infrastruktur distribusi, dan budaya makan masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan permintaan sektor perikanan perlu diiringi dengan perbaikan sistem distribusi, promosi konsumsi ikan, serta penguatan rantai pasok antarwilayah di Pulau Sumatera.